

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah untuk provinsi, kabupaten dan kota disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penganggaran UU No. 32 Tahun 2004 melibatkan dua pihak: eksekutif dan yudikatif. Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan daerah berkewajiban menyusun rancangan APBD dan hanya dapat dilaksanakan jika disahkan oleh DPRD dalam proses pengesahan anggaran (Ekawarna, Sam, Rahayu, 2009).

Kinerja anggaran merupakan metode penganggaran yang memperhitungkan beban kerja dan harga satuan dari setiap kegiatan terstruktur. Efisiensi anggaran pemerintah daerah selalu berkaitan dengan bagaimana otonomi pemerintah daerah sebagai satuan kerja dapat mencapai tujuan kerja dengan dana anggaran yang tersedia. Analisis kinerja anggaran meliputi metode rasio keuangan, metode economic value added / EVA (di Indonesia metode ini dikenal dengan NITAMI / metode nilai tambah 12 ekonomi), balanced scorecard, cost performance, analisis anggaran, dll. (Ekawarna, Sam, Rahayu, 2009).

Analisis rasio keuangan adalah laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan risiko perusahaan atau tingkat kesehatan perusahaan. Rasio keuangan dikategorikan menjadi rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Helpert (1991) adalah alat analisis kinerja yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang bertujuan untuk memperjelas perubahan kondisi keuangan masa lalu dan kinerja operasional, untuk memahami rasio keuangan dan mengidentifikasi risiko dan

risiko.Membantu menjelaskan tren pola perubahan ini. Kesempatan untuk memperkenalkan perusahaan yang bersangkutan.

Pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, daerah memiliki peluang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi yang ada, baik dari sisi sumber daya manusia, keuangan maupun sumber daya lainnya yang merupakan aset daerah (Ronald, Sarmiyatiningsih, 2010).

Memiliki kewenangan yang lebih besar dapat memberikan daerah kesempatan untuk menggali potensi daerah yang berbeda, mengoptimalkan sumber daya yang berbeda yang mereka miliki, dan dengan demikian memfasilitasi pencapaian peluang ekonomi yang lebih baik. (Setiaji dan Adi Priyo, 2007).

Tujuan pemberdayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan perannya. Selain itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan lebih berdaya saing dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, singularitas, serta potensi dan keragaman lokal (Sulasmi dan Suwarno, 2006). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2010 tentang Alokasi Sementara Dana Untuk Pembagian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 Anda berkesempatan untuk mengemukakan alasan, mengelola dan mengelola pajak bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.. Pengelolaan PBB yang mandiri diharapkan dapat memberikan kontribusi yang ideal terhadap pendapatan asli daerah. Dari uraian latar

belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dinas Pariwisata Kota Padang Pada Masa Covid-19”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul yang telah ditentukan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah **“Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dinas Pariwisata Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19?”**

## **1.3 Tujuan Magang**

### **1.3.1 Tujuan Umum Magang**

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keuangan Negara program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perguruan tinggi dengan keadaan di lapangan.
3. Sebagai cara agar menjadikan peserta magang SDM yang berkualitas dan berpengalaman.

### **1.3.2 Tujuan Khusus Magang**

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan Dinas Pariwisata Kota Padang pada masa pandemi covid-19

## **1.4 Manfaat Magang**

Berikut manfaat kegiatan magang :

1. Sebagai penambahan pengetahuan bagi penulis dan penerapan ilmu yang diperoleh pada waktu perkuliahan.
2. Untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman tentang mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan Dinas Pariwisata Kota Padang pada masa pandemi covid-19.

3. Bagi penulis, untuk menambah kualitas diri untuk mengetahui dunia kerja dan terjun ke lapangan kerja.

### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Pada program magang ini penulis memilih Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai tempat magang. Dalam menjalankan kegiatan ini, penulis menentukan waktu magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja yaitu bulan Januari s/d Maret 2022.



## 1.6 Metode Pengumpulan Data

### 1.6.1 Study Keperpustakaan

Dalam kegiatan ini dilakukan pencarian data yang relevan dengan objek penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, tesis, karya ilmiah, disertasi, internet, dan sumber-sumber lainnya.

### 1.6.2 Study Lapangan

#### 1. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat berkepentingan dan observasi instansi terkait.

#### 2. Data sekunder

Data diperoleh dengan cara pengambilan dokumen tertulis maupun elektronik di instansi terkait untuk kelengkapan data yang lain.

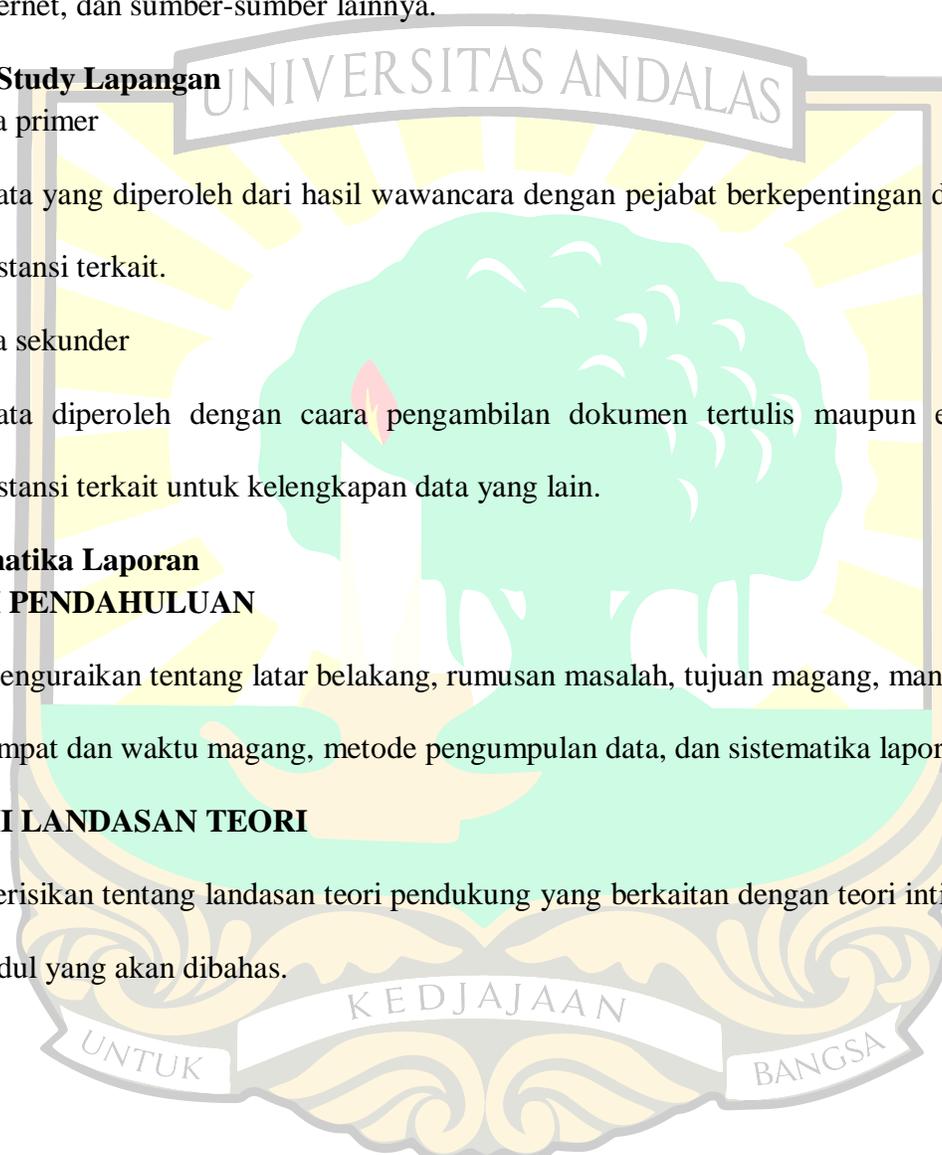
## 1.7 Sistematika Laporan

### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data, dan sistematika laporan magang.

### BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang landasan teori pendukung yang berkaitan dengan teori inti berdasarkan judul yang akan dibahas.



### **BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA KOTA PADANG**

Memberikan gambaran tentang profil Dinas Pariwisata Kota Padang, meliputi sejarah tentang Dinas Pariwisata Kota Padang.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan rinci mengenai Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dinas Pariwisata Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19.

### **BAB V PENUTUP**

Penulis memberikan suatu kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan pada Dinas Pariwisata Kota Padang.

